

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang terbesar. Sebagian besar pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Akan tetapi, masih banyak masalah yang dihadapi Negara dalam rangka memaksimalkan pendapatan Negara dari sektor pajak, salah satunya yaitu adanya tunggakan pajak. Timbulnya tunggakan pajak tidak bisa dilepaskan dari sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia yaitu sistem *self assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, berada pada anggota masyarakat itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

Penyusunan laporan keuangan oleh manajemen bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan pada periode tertentu. Salah satu informasi penting dalam laporan keuangan adalah informasi laba. Laba perusahaan merupakan salah satu informasi yang sangat dibutuhkan baik bagi pihak investor, kreditur dan pemilik perusahaan untuk pengambilan keputusan. Para investor, kreditur dan pemilik perusahaan dapat mengestimasi kekuatan laba guna mengukur resiko dalam investasi dan kredit serta digunakan sebagai indikator penilaian suatu kinerja. Tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh sering sekali dikaitkan dengan prestasi manajemen. Oleh karena itu

dalam kenyataannya seringkali pihak manajemen melakukan suatu tindakan manajemen laba yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.

Sesungguhnya suatu perusahaan menghadapi suatu dorongan yang bertentangan pada saat melakukan manajemen laba. Manajemen perusahaan ingin menunjukkan kinerja keuangan yang baik yaitu dengan cara memaksimalkan laba yang di laporkan kepada pemegang saham dan pengguna eksternalnya. Namun di sisi lain manajemen perusahaan menginginkan agar dapat meminimalkan laba kena pajak yang dilaporkan untuk keperluan pajak (*ettredge et al., 2008*).

Perusahaan yang ada di Indonesia dalam membuat laporan keuangan berpedoman pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan peraturan perpajakan. Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan perpajakan biasanya karena dalam penyusunan laporan keuangan, pada standar akuntansi lebih memberikan kebebasan bagi manajemen di dalam menentukan suatu prinsip dibandingkan yang diperoleh menurut aturan-aturan perpajakan. Semakin besar suatu motivasi yang ada pada manajemen untuk melakukan manajemen laba akan mengakibatkan semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dengan laba perpajakan (Mills and Newberry, 2001 dalam Irreza dan Yulianti, 2010).

Menurut pendapat Philips, Pimcus dan Rego (2003) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan merupakan suatu beban yang muncul akibat adanya perbedaan temporer yang terjadi antara laba akuntansi yaitu laba di dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal dengan laba fiscal yaitu laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.

Beban Pajak Tangguhan dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba. Pengakuan Pajak Tangguhan, baik beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan bisa mengakibatkan kemungkinan pembayaran pajak pada periode mendatang jadi lebih besar atau lebih kecil. Kondisi seperti ini membuka peluang bagi manajemen untuk memanipulasi labanya sehingga bisa memperkecil pajak yang harus dibayar.

Fenomena kasus manajemen laba yang pernah terjadi di Indonesia adalah seperti kasus PT Kimia Farma pada tahun 2002 yang melakukan kesalahan pencatatan pada penjualan sehingga laba overstated sebesar Rp 32,7 miliar untuk periode akuntansi 2001. Pada saat itu

laba dilaporkan adalah Rp 132 miliar. Namun, setelah dilakukan audit kembali, laba PT Kimia Farma ternyata hanya sebesar Rp 99,5 miliar (Anggana dan Prastiwi, 2013). Selain itu, kasus lain yang terjadi adalah kasus PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang terjadi tahun 2005. PT KAI melaporkan laba Rp 6,90 miliar, padahal seharusnya rugi sebesar Rp 63 miliar (www.liputan6.com).

Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah menekan pembayaran pajak seoptimal mungkin. Agar pembayaran pajak dapat ditekan seminimal mungkin, maka diperlukan suatu perencanaan yang baik yaitu melalui perencanaan pajak.

Perencanaan Pajak merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh seorang Wajib Pajak orang pribadi agar dapat melakukan penghematan dengan cara menekan jumlah kewajiban pajak tanpa bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak dan manajemen laba merupakan suatu hal yang saling terkait karena keduanya sama-sama memiliki potensi untuk mempengaruhi Laba akuntansi dan Laba Fiskal. Perencanaan Pajak dilakukan untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya. Hal ini akan terkait dengan pelaporan Laba Perusahaan, dimana laba yang tinggi akan menyebabkan pembayaran pajak juga tinggi. Oleh karena itu, manajer perusahaan akan menggunakan berbagai teknik manajemen laba untuk mencapai tingkat laba dengan cara merekayasa Laporan Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan metode Standar Akuntansi.

Pada penelitian ini adalah salah satu replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh A.A Gede Raka Plasa Negara (2017) dengan judul “Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015”.

Hasil penelitian Aditama *et al.*, (2014) menyatakan bahwa perencanaan pajak ternyata berpengaruh negatif terhadap manajemen laba karena penelitiannya pada perusahaan non manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian Fitriany *et al.*, (2016) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian Negara *et.,al* (2017) menemukan bahwa Beban pajak tangguhan dan Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul :
“Analisis Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba
(Studi kasus pada perusahaan Manufaktur periode 2018 yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia).”

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana uraian pada latar belakang diatas maka penulis menyampaikan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.
2. Untuk menguji apakah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang “Akuntansi Perpajakan” yang membahas tentang Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya dalam kajian yang sama serta menambah wawasan bagi pembacanya.

2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi Penulis

Diharapkan melalui penelitian ini penulis dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai teori-teori perpajakan khususnya mengenai Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan evaluasi dalam melakukan perencanaan pajak.

2.3. Bagi Pihak lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan topik yang sama.